

Mediatisasi Aksi Massa Islam 2 Desember 2016

Meistra Budiasta

Prodi. Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno

meistra@gmail.com

Abstrak. Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 adalah aksi massa terbesar setelah Mei 1998. Aksi massa ini menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dihukum dan dipenjarakan karena dianggap telah menghina ayat suci Al-Quran. Dalam aksi ini massa melakukan ibadah salat Jumat di sepanjang jalan utama Jakarta dan berpusat di Monumen Nasional (Monas). Peristiwa aksi massa dan masalah Ahok tersebut seperti menghidupkan kembali penggunaan isu agama dan etnis yang selama Orde Baru digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Islam digunakan untuk menyingkirkan kelompok yang dianggap kiri dan asimilasi budaya Cina dilakukan karena diduga memiliki hubungan dengan peristiwa 65. Tulisan ini untuk melihat bagaimana mediatisasi politik ketakutan dengan menggunakan massa dan bagaimana konstruksi dari media memberitakan aksi 2 Desember 2016.

Kata kunci: mediatisasi, politik ketakutan, massa, etnis cina, media massa, televisi

Abstract. action Islamic Bela December 2, 2016 was the largest mass action after May 1998. The protesters demanded that Jakarta Governor Basuki Tjahja Purnama (Ahok) convicted and imprisoned because they have insulted the holy verses of the Koran. In this action the mass of worshipers for Friday prayers along the main streets of Jakarta and is centered at the National Monument (Monas). The events of mass action and the Ahok issues like reviving the use of ethnic and religious issues during the New Order is used by the government to maintain power. Islam used to exclude groups considered left and assimilation of Chinese culture performed for suspected links to the event 65. This paper to see how mediatisasi using the politics of fear and how the construction of a mass media reported the action of December 2, 2016.

Keywords: mediatisasi, the politics of fear, mass, ethnic Chinese, mass media, television

PENDAHULUAN

Aksi 2 Desember 2016 merupakan aksi terbesar pasca Mei 1998. Dengan menggunakan nama aksi bela Islam Jilid III para massa yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan Islam menuntut agar Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dijatuhkan hukuman penjara karena dianggap melakukan penghinaan terhadap ayat suci Al Quran. Dalam aksi

tersebut massa melakukan ibadah Jumat bersama di jalan utama kota Jakarta dan berpusat di Monumen Nasional (Monas) dengan melibatkan banyak massa dari luar kota. Kasus ini berawal dari pernyataan Ahok yang menyebutkan bahwa dirinya merasa dihalangi oleh sekelompok orang untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan ayat Al Maidah. Melalui viral di media sosial pernyataan tersebut tersebar secara luas dan menjadi

kontroversial sehingga pada puncaknya terjadi aksi massa tersebut. Peristiwa aksi massa dan permasalahan Ahok tersebut seperti menghidupkan kembali penggunaan isu agama dan etnisitas yang pada masa Orde baru keduanya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Islam dipakai untuk menyigmirkan kelompok yang dianggap kiri dan Tionghoa dibelenggu secara kultural karena diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa 65.

Aksi massa kelompok Islam tersebut diliput secara langsung oleh stasiun televisi swasta maupun televisi pemerintah. Dalam tayangan tersebut televisi menampilkan gambaran massa yang terlihat banyak dengan narasi baik melalui teks dan laporan para reporter bahwa aksi ini diikuti oleh jutaan umat Islam. Para penonton televisi seperti diajak untuk melihat bagaimana agama yang mayoritas memiliki kuasa untuk menguasai ruang publik dan menunjukkan kekuatan bahwa bagi kelompok minoritas baik secara etnis dan agama untuk taat kepada kuasa tersebut. Dalam bingkai demokrasi persaingan politik dengan menggunakan argumentasi dan ide merupakan hal yang biasa terjadi namun ketika menggunakan isu sektarianisme seperti agama dan ras maka akan mencederai proses demokratisasi. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana politik ketakutan terhadap minoritas (agama maupun etnis) dimediatitasi oleh televisi dan melihat bagaimana konstruksi dari media tersebut dalam mewujudkan politik ketakutan. Dengan menggunakan konsep mediatisasi, penulis akan mengkaji permasalahan itu melalui tayangan langsung aksi 2 Desember 2016.

Politik ketakutan disebarkan melalui media massa maupun media sosial sehingga menghasilkan sebuah wacana bahwa minoritas akan sulit menjadi pemimpin di Indonesia. Proses ini sudah sejak lama terjadi semenjak masa kolonialisme hingga saat ini, berbagai peristiwa yang menimpa kelompok minoritas sudah banyak terjadi. Aksi pada 2 Desember tersebut seperti ingin mengembalikan kembali legitimasi kekerasan terhadap minoritas, meski dalam bingkai aksi damai. Legitimasi tersebut turut mewarnai hubungan sosial di masyarakat, di mana sebagian kecil kelompok intoleran dengan organisasi kemasyarakatannya beberapa kali sering melakukan intimidasi kepada minoritas baik dalam bentuk kepercayaan, agama, maupun suku. Kekerasan dan intimidasi itu sudah berlangsung di kehidupan sosial masyarakat dan ditayangkan di pemberitaan media massa, dalam kajian mediatisasi konsep politik ketakutan di Indonesia memiliki keterkaitan yang cukup erat. Pada masa Orde Baru khususnya orang Tionghoa dihilangkan statusnya dari ranah media seperti film, surat kabar, dan sebagainya. Menurut Aimee Dawis Kebijakan itu terjadi setelah pasca 1965 rezim Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi yang mewajibkan masyarakat Indonesia Tionghoa untuk melepas kebudayaan dan bahasa Mandarin (2009: 4) dilanjutkan dengan mewajibkan mengganti nama Indonesia kepada mereka yang masih menggunakan nama Mandarin. Sebagian dari mereka tidak pernah dihadirkan sebagai sosok yang sama seperti orang Indonesia. Media massa yang saat itu menjadi alat pemerintah seperti ingin menyeragamkan masyarakat dengan suku tertentu.

Media dan penyebaran ketakutan merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan untuk menghasilkan wacana sebuah isu agar masyarakat dapat dikontrol. Suatu hal yang berbahaya dari penyebaran ketakutan melalui media tersebut adalah munculnya kelompok-kelompok intoleran yang pada akhirnya mengancam kebebasan ekspresi masyarakat. Media dengan berbagai informasi dan kepentingannya memiliki tujuan yang secara ekonomi politik dapat menjadi alat bagi aktor-aktor politik melegitimasi kekuasaan. Dalam bukunya yang berjudul "Terrorism and Politic of Fear" menyatakan bahwa "*The politics of fear relies on a compliant mass media that will carry news reports and other popular-culture messages that promote fear*". Dengan demikian laporan dari suatu berita dapat berdampak terhadap keadaan sosial kultural masyarakat terutama salah satunya penyebaran rasa takut. Sebagai contoh ketika pasca 9/11 di mana media banyak memberitakan bahaya dari serangan terorisme dan membuat keadaan sosial masyarakat menjadi resah di seluruh dunia. Bahkan di Amerika Serikat sebagai negara yang mengalami serangan tersebut dampaknya terhadap masyarakat yakni maraknya rasialisme khususnya stereotype terhadap orang Timur Tengah.

Di Indonesia, pada perkembangannya saat ini informasi dari media massa telah menjadi sumber utama bagi sebagian masyarakat. Selain itu logika politik yang berkembang dalam diskursus publik maupun elit tidak terlepas dari informasi yang mereka terima dari media massa tersebut. Para pelaku media yakni para wartawan, redaktur, pemilik, dan penyiar secara institusi memiliki keterkaitan erat dari logika-logika

informasi yang mereka dapatkan dari berbagai ruang informasi baik media secara konvensional dan online. Para pelaku politik juga banyak mengambil analisa serta kebijakannya berdasarkan informasi dari media massa yang mereka dapatkan maupun ikuti. Sementara publik memanfaatkan media khususnya televisi untuk mencari berita atau referensi pengetahuan mengenai situasi nasional dan sebagainya. Pandangan demikian dalam kajian media dinamakan Mediatisasi, konsep ini yang akan menjadi fokus utama tulisan ini. Aksi demonstrasi 4 November dan 2 Desember 2016 merupakan rangkaian dari mediatisasi tersebut yang secara wacana mengarah kepada penyebaran politik kebencian dan ketakutan kepada kelompok minoritas. Sebagai bagian dari Mediatisasi wacana politik ketakutan kepada minoritas di Indonesia tidak berdiri sendiri ataupun isu yang baru melainkan memiliki sejarah yang cukup panjang.

Penelitian mengenai Mediatisasi politik dan politik ketakutan telah dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai dunia dengan bermacam isu dan permasalahan. Seperti buku dari David L. Altheide yang berjudul "*Terrorism and The Politic of Fear*" yang dalam kajiannya mengungkapkan bahwa Altheide melihat wacana takut sebagai sesuatu yang telah menguasai publik lebih dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara Amerika Serikat AS, tetapi juga di tempat lain dalam masyarakat modern. Menurutnya "media massa diatur melalui format hiburan kemudian mempromosikan konflik dan drama, emosional, dan spontanitas. Media massa dan budaya populer sangat relevan dalam memproduksi makna dengan menyediakan

signifikan makna simbolik dan perspektif yang dapat ditarik oleh individu dalam situasi sosial yang spesifik (Altheide, 2006: 61). Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa media massa memiliki peran dalam menciptakan rasa takut di dalam masyarakat melalui konten yang mereka tampilkan. Dalam pernyataan lain Altheide menyatakan bahwa "politik media telah masuk dalam kerangka lembaga. Beberapa contohnya adalah isu-isu domestik dan politik media, seperti isu terorisme internasional. Isu ini membuat massa kemudian berdialektika mengenai kejahatan dan keadilan atau perang dan terorisme. Sehingga timbul asumsi di kalangan publik tentang kejahatan, hukum dan ketertiban. Media massa kemudian fokus tentang kejahatan yang dramatis, spektakuler, dan kekerasan. Dalam buku ini Altheide penuh dengan ide-ide kritis mengenai kajian media dan terorisme serta politik ketakutan. Tentu saja, masa depan terorisme dan perang preventif melawan teroris adalah selalu dinamis dan tanpa henti serta tidak mengarah dengan kelas. Namun yang menarik dari tulisan di buku ini adalah efek dari terorisme di Amerika Serikat yang kemudian menimbulkan tantangan serius dalam hal etnosentrisme di Amerika,

Tulisan Michael Meyen, Markus Thieroff & Steffi Strenger berjudul "*Mass Media Logic and The Mediatization of Politics*" secara teoritik mengkaji logika dari media massa sebagai faktor pendorong dari perubahan sosial dan perubahan itu sendiri disebabkan oleh media massa. Logika media massa sendiri merupakan bentuk dari konstruksi sosial yang sangat kompleks serta terstruktur berdasarkan berbagai interaksi dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan

mediatisasi politik, hal ini mengacu pada logika media massa yang dimana oleh para aktor-aktor politik menjadi arena untuk menentukan posisi dan sebagai media perubahan dalam representasi politik kepada publik. Untuk mempermudah melakukan aplikasi dari kajian teoritis ini maka Meyen dkk membagi analisa ke dalam beberapa level. Pada level Mikro, tindakan dalam sistem fungsional sosial seperti politik, ilmu pengetahuan, atau ekonomi, para aktor percaya pada efek media massa (pengaruh pada pengetahuan, sikap, emosi, atau perilaku). Pada level Meso, karena tindakan fungsional sosial tersebut maka mengubah strategi mereka sesuai dengan logika media massa dan memindahkan sumber daya mereka dalam hal yang sama. Pada level Makro, menulis ulang program yang mengoperasionalkan sistem fungsional sosial tersebut dengan kode-kode biner mengintegrasikan referensi untuk media (2014 :282). Meyen dkk memberikan contoh sederhana untuk mempermudah analisis logika media massa dan mediatisasi politik berdasarkan level tersebut secara berurutan yakni dengan *pertama*, partai politik memilih calon yang berpotensi menjadi bintang televisi kemudian mencitrakan mereka untuk para pesaing politik, *kedua*, dengan mengerahkan sumberdaya para pelaku politik menkonstruksikan suasana konvensi partai politik yang megah agar terlihat bagus dalam tayangan media, ketiga, perubahan politik terjadi bukan karena kovensi partai melainkan juga perilaku dan cara berpakaian. Tulisan ini menyajikan sebuah kategori analitis untuk melihat konstruksi media massa khususnya mengenai dunia politik serta mediatisasi politik. Menurut Meyen dkk, tema mediatisasi yang disarankan pada tulisan

ini mengacu pada efek media massa jangka panjang secara eksklusif. Hal ini diduga bahwa para pelaku politik percaya pada tataran Mikro efek orde dan karena itu menyesuaikan strategi masing-masing serta sumber daya organisasi dan program-program sistem politik dengan logika media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian mengenai media massa pada perkembangan saat ini semakin pesat dan memiliki karakteristik yang semakin beragam. Media massa tidak lagi sekedar sebagai sumber dari segala macam bentuk informasi beserta efek dari pesan-pesan informasinya tersebut. Media massa kini menjadi bagian dari pembentukan suatu informasi atau bisa disebut sebagai satu jaringan dengan kondisi sosial masyarakat, artinya disini adalah bahwa apa yang disampaikan media merupakan suatu proses yang berkenyambungan dengan perkembangan sosial kemasyarakatan. Salah satu konsep kunci untuk melihat fenomena ini adalah mediatisasi. Konsep mediatisasi menurut Stig Hjarvard (2008) merupakan konsep yang dipakai untuk menjelaskan kelanjutan logika media dalam berbagai bidang: politik, budaya, agama, dan sebagainya (2008: 42)

Mediatisasi secara konseptual tidak memiliki definisi tunggal melainkan terdiri dari beberapa pandangan. Salah satu pandangan yang paling mendasar dari mediatisasi ini adalah Nick Couldry dan Andreas Hepp yang memandang kajian ini dari dua bentuk yakni secara institusionalis dan konstruksi sosial. Dalam pandangan institusionalis, mediatisasi dipandang sebagai sebuah proses di mana aktor sosial non media harus beradaptasi dengan aturan

media bertujuan logika produksi, dan hambatannya (lihat Hjarvard, 2008). Dalam pandangan konstruksi sosial, memandang sebagai sebuah proses di mana perubahan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengendalikan konstruksi komunikasi yang dapat mengubah kebudayaan dan masyarakat' (Hepp, 2013: 616). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Mediatisasi dipahami sebagai teorisasi dari transformasi media yang dari waktu ke waktu, berfokus pada pengaruh secara luas lembaga media pada praktek dan teknologi pada beragam bentuk pengaturan sosial, termasuk politik, masyarakat sipil, agama, budaya populer, dan seni. Dengan definisi yang lebih detail Hjarvard merumuskan mediatisasi sebagai mediatisasi sebagai proses dimana budaya dan masyarakat menjadi tergantung kepada pada logika media media dan logika masyarakat, proses ini selanjutnya ditandai dengan dualitas dalam media yang secara kelembagaan memperoleh statusnya serta masyarakat pada saat yang sama menjadi terintegrasi ke dalam kehidupan sosial di lembaga sosial lainnya dan lingkungan budaya. (Hjarvard, 2013: 153).

Membahas mediatisasi maka diperlukan kajian yang luas utamanya mengenai media massa, masyarakat, beserta perubahan sosialnya. Konsep mediatisasi sendiri telah berkembang tidak hanya fokus pada efek media, namun pada keterkaitan antara perubahan media komunikasi di satu sisi dan perubahan sosial budaya di sisi lain. Sebagai bagian dari praktik komunikasi sehari-hari dan konstruksi komunikatif tentang realitas. Penelitian mengenai mediatisasi yakni menyelidiki keterkaitan antara media sebagai perubahan komunikatif dan juga perubahan sosial

budaya kemudian dipahami sebagai sebuah meta-proses (konstruksi konseptual yang merujuk pada proses jangka panjang). Media tidak selalu menjadi penyebab dari transformasi perubahan tetapi mereka telah menjadi bagian konstitutif dari sebuah artikulasi politik, ekonomi, pendidikan, agama. Misalnya, televisi, dengan menampilkan sosok ahli dalam agama yang menyebarkan inspirasi-inspirasi kehidupan kemudian bagaimana para spesialis keagamaan tersebut mempromosikan perubahan individu secara cepat dalam gaya hidup, membangun gagasan agama bersama-sama dengan lembaga lain dan pergeseran budaya yang lebih luas dalam persepsi moralitas.

Konsep Kerumunan

Kerumunan merupakan sebuah tindakan kolektif yang dimana antara masyarakat tidak saling mengenal. Dalam isitiah sosiologi kerumunan berkaitan dengan kegiatan kolektif masyarakat, bila di definisikan Kerumunan adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kedekatan fisik kemudian berinteraksi dan memiliki fokus masalah yang sama. Beberapa peneliti membagi beberapa tipe dari kerumunan tersebut, konsep klasik berasal dari Blumer yang membagi dua tipe kerumunan yakni kerumunan kasual dan kerumunan Kristal (2005:150). Kerumunan kasual, berkaitan dengan kumpulan orang yang kebetulan berada di suatu lokasi. Kerumunan Kristal, yakni kegiatan kerumunan untuk menarik perhatian mereka sendiri. Tipe lain dari kerumunan ini adalah konvensional, model ini merujuk kepada suatu kumpulan massa yang disengaja dan terikat dengan norma sebagai contoh pesat pernikahan, konser

music dan sebagainya. Beberapa definisi kerumunan diatas dapat menjadi rujukan untuk mengkaji bagaimana massa terlibat dalam suatu peristiwa dan didalamnya mereka berinteraksi untuk suatu isu baik itu politik, sosial, maupun budaya populer. Dalam penelitian ini konsep kerumunan dipakai untuk melihat bagaimana aksi massa tanggal 2 Desember 2016 sebagai peristiwa politik dengan melibatkan banyak kerumunan. Dengan menggunakan isu ayat suci massa berkumpul tanpa mengenal satu sama lain kemudian beribadah bersama di tempat umum, kesan aksi ini kemudian menimbulkan rasa takut pada kelompok minoritas.

Islam dan Identitas Tionghoa pasca Orde Baru

Sepanjang masa Orde Baru permasalahan agama dan identitas orang Tionghoa menjadi komoditas politik bagi negara pada masa itu. Islam dan keberadaan Tionghoa dijadikan alat oleh pemerintahan Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaannya dalam berbagai bentuk. Keduanya dimanfaatkan sebagai untuk menjatuhkan lawan politik, Islam digunakan untuk menyingkirkan kelompok kiri dan Tionghoa dibungkam secara struktural dan mematakannya melalui beragam bentuk kultural sehingga etnis ini tidak memiliki ruang dalam kehidupan sosial di masyarakat khususnya pada bidang politik.

Pasca Orde Baru, Islam dan Tionghoa mendapatkan ruang yang terbuka untuk mengekspresikan identitasnya dalam hubungan sosial budaya di Indonesia. Bagi orang Tionghoa ruang tersebut dimanfaatkan untuk mengekspresikan identitasnya secara simbolik seperti perayaan imlek, pakaian

bernuansa Tionghoa dan kemunculan media massa berbahasa Mandari. Suryadinata (2010:218) menyatakan bahwa kebangkitan etnis Tionghoa di Indonesia yang diawali dengan tiga pilar budaya dari Tionghoa itu sendiri yaitu pers Tionghoa, sekolah Tionghoa, dan organisasi Tionghoa, namun ketiganya tidak juga menjadi hal yang tunggal karena identitas kelompok ini terus melebur. Namun sampai hari ini pemberitaan mengenai orang Tionghoa masih berupa pembebasan, pengakuan kembali, pemberdayaan dan kebangkitan kelompok yang selama ini ditekan. Tetapi gagasan utama tentang etnisitas yang amat bermasalah tidak pernah dipersoalkan (Heryanto, 2015:210). Etnis Tionghoa masih mendapatkan stereotype khususnya dalam media massa, mereka digambarkan sebagai kelompok etnis yang secara ekonomi lebih mampu dan dikesankan sebagai kelompok konglomerat. Gambaran ini terlihat di media massa dalam film, tayangan berita televisi, dan lain sebagainya. Selain representasi di media tersebut, kelompok Tionghoa juga memiliki akses untuk berpolitik, pada masa Orde Baru mereka harus meleburkan namanya namun pada era sekarang nama sebagai identitas Tionghoa tidak menjadi permasalahan. Langkah politik Tionghoa pasca Orde Baru sebenarnya bukan hal yang luar biasa, setelah reformasi bergulir ditandai dengan pemilihan umum tahun 1999 ada beberapa etnis Tionghoa menjadi anggota DPR. Salah satu anggota tersebut adalah Alvin Lie, beliau terpilih dari partai yang beraliran Islam yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Kiprah etnis Tionghoa di eksekutif (Gubernur, Bupati, Walikota) baru mengalami peningkatan ketika sosok Basuki Tjahja Purnama menjadi Bupati

Belitung tahun 2007 dan menjadi Gubernur DKI tahun 2014 menggantikan Joko Widodo. Kiprah politik etnis Tionghoa semenjak kenaikan Ahok tersebut dalam politik Indonesia semakin mendapat sorotan dan seperti sebuah sejarah bahwa kelompok yang selama ini dianggap minoritas dapat menjadi pemimpin eksekutif. Meski tantangan semakin besar utamanya dari kelompok-kelompok nasionalis dan Islam fundamentalisme. Tidak dapat dipungkiri muncul etnis Tionghoa dalam pusaran kekuasaan politik kemudian mendapat penolakan dari kelompok yang selama ini menghambat etnis ini maju dalam politik. Tionghoa hanya diberi peran dalam kegiatan ekonomi dan tidak diberi ruang dalam aktivitas politik, stigma tersebut masih menjadi alat untuk menjegal etnis tersebut. Salah satu dengan menggunakan isu agama melaluo pengarahan massa, memanfaatkan jumlah pemeluknya yang banyak kelompok intoleran menggunakan Islam sebagai alat menghalangi minoritas untuk berpolitik.

Mengamati Islam di Indonesia secara mendalam maka cirinya paling menonjol pada masa Orde Baru (1966 – 1998). Bilamana pada masa sebelum Islam mengalami banyak dinamisasi dan menjadi bagian dari politik Indonesia bersama berbagai ideologi melawan kolonialisme maka pada era ini Islam menjadi lebih dominan dalam kehidupan politik Indonesia. Hingga beberapa hal tertentu Islam telah menentukan kerangka, batas-batas, dan isi pergulatan kekuasaan di Indonesia. Di masa itu Islam menjadi alat Soeharto untuk membasmi kelompok komunis namun setelah itu Islam kembali dipolitisasi dengan banyak ditangkapnya tokoh-tokoh Islam pada era tahun 70an.

Tetapi sikap rezim Orde Baru terhadap kelompok Islam berubah kembali sekitar tahun 80an dan setelah itu terus mengalami kebangkitan sampai pada puncaknya pembebasan tokoh-tokoh politik Islam serta pembentukan organisasi intelektual muslim Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada era 90an. Hal yang paling mencolok dari bentuk Islamisasi adalah ketika Soeharto melaksanakan ibadah Haji bersama keluarga dan mencabut larangan mengenakan Jilbab di sekolah-sekolah (Heryanto, 2012:18). Sampai kepada akhirnya pemerintahan Soeharto jatuh yakni pada tahun 1998 kelompok Islam kembali tampil dengan berbagai bentuk aliran. Memasuki pemerintahan Abdurahman Wahid tahun 2000 polarisasi terhadap gerakan Islam semakin terlihat, di mana pada masa itu isu pembantaian dukun santet merebak di Jawa Timur namun banyak yang menjadi korban adalah para kyai NU. Meskipun terlihat seperti pembantaian terselubung berkaitan dengan aliran politik Islam yang dianut Abdurahman Wahid namun peristiwa itu bisa dikatakan sebagai titik awal kehadiran kelompok-kelompok Islam fundamentalisme pasca Orde Baru. Puncaknya yakni ketika di tahun yang sama terjadi kerusuhan berbau agama di Ambon, Maluku, peristiwa tersebut menjadi celah bagi kelompok intoleran untuk kemudian mencoba mengintervensi politik di Indonesia. Dengan dukungan para elit politik di Jakarta yang masih setia dengan era Orde Baru terbentuklah lasca-laskar dan ormas-ormas Islam dengan pola politiknya seperti anti terhadap multikulturalisme. Laskar dan ormas tersebut menjadi besar selain dipelihara oleh akto-aktor politik Orde Baru juga

diberi ruang oleh sebagian oknum aparat untuk menjadi alat keamanan.

Pasca Suharto jatuh, pengaruh politik Islam konservatif kian meningkat, sebagian karena partai-partai politik Islamis diizinkan memainkan peran legal dan terbuka dalam politik Indonesia, dan sebagian lagi karena kelompok-kelompok masyarakat sipil garis keras, yang beroperasi di luar sistem politik, berkembang dalam jumlah, ukuran, dan ditempa pengalaman. Kelompok Islam ini kemudian mendapat ruang lebih besar lagi ketika mulai mempersoalkan perbedaan keyakinan dan juga aliran dalam agama Islam itu sendiri. Islam konservatif beserta ormas garis keras kemudian banyak melakukan tindakan kekerasan kepada kelompok minoritas seperti aliran Ahmadiyah, Penolakan pendirian pendirian rumah ibadah bagi umat Kristiani, perusakan tempat hiburan dengan dalil moralitas, dan lain sebagainya. Menurut Setara Institute, terdapat 216 kasus serangan terhadap minoritas agama pada 2010, 244 kasus pada 2011, dan 264 kasus pada 2012.1 Wahid Institute mendokumentasikan 92 pelanggaran terhadap kebebasan agama dan 184 peristiwa intoleransi beragama pada 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 134 peristiwa intoleransi pada 2010. (2013:15).

Kebangkitan kelompok Islam yang intoleran dan kekerasan yang mereka tampilkan dalam tayangan pemberitaan membuat kelompok minoritas di Indonesia mengalami trauma akan kekerasan yang bisa terjadi kapan waktu. Massa kelompok Islam fundamentalisme yang melakukan tindakan intoleran tersebut dihadirkan dalam media televisi sebagai orang-orang yang berwajah seram lengkap dengan

massanya menambah teror bagi kelompok minoritas. Situasi tersebut secara tidak langsung dapat membawa trauma kepada minoritas yang selama masa pemerintahan Soeharto mendapat tekanan dan diskriminasi sehingga mereka tidak mempunyai ruang gerak dalam politik. Pada masa sekarang media memiliki peran sentral dalam membentuk opini namun perkembangannya tidak hanya opini tetapi media telah menjadi bagian dari opini tersebut.

Media massa pasca Orde Baru terutama industri televisi yang berkembang pesat dengan kebebasan kepemilikannya membuat konten program televisi menjadi lebih condong kepada kepentingan dari media itu sendiri. Pemberitaan tentang tindakan kekerasan tersebut dalam era keterbukaan informasi tidaklah menjadi persoalan namun ketika narasi dari pembawa berita ataupun dari institusi media tersebut mengarahkan kepada suatu propaganda politik maka independensi dari institusi tersebut patut dipertanyakan. Media pada masa sekarang berada pada posisi yang berada didalam lingkaran struktur kehidupan sosial, media tidak lagi menjadi sumber referensi utama melainkan ikut serta dalam dinamisasi sosial budaya. Dalam mediatisasi posisi media berada ditengah dari pusaran transformasi sosial yang terjadi, posisi tersebut bukan menjadikan media sebagai jalan tengah tetapi media mentransformasikan apa yang terjadi dalam realita sosial. Pada kasus aksi massa 2 Desember 2012 ini, konsep massa atau kerumunan yang terdiri dari kelompok agama Islam yang meminta Ahok dihukum adalah sebagai perwakilan dari kelompok mayoritas. Sedangkan kelompok minoritas secara historis mengalami trauma politik

yang cukup besar karena pada masa Orde Baru dengan berbagai bentuk mereka dihalangi untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Media massa kemudian menyiarkan pemberitaan aksi massa tersebut dengan berbagai konstruksinya sehingga seakan-akan kembali melegitimasi politik ketakutan tersebut. Secara lebih ringkas penulis melihat aksi massa 2 Desember 2012 memediatisasi politik ketakutan terhadap kelompok minoritas dan merupakan bentuk lain dari sebuah ancaman akan tidak adanya ruang bagi minoritas untuk berpolitik. Secara historis model politik ketakutan ini terus dipelihara dengan ruang yang berbeda.

a). Mediatisasi Aksi Massa Islam 2 Desember 2016

Aksi massa bela Islam Jilid III merupakan rangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam kepada pemerintah agar segera mengadili Ahok karena dianggap telah menistakan ayat Al Maidah. Gerakan tersebut menjadi besar setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa pernyataan Ahok tersebut telah dianggap menghina dan menistakan agama dan ayat Al Quran. Tidak lama setelah itu terbentuklah koalisi dari berbagai ormas Islam di Indonesia bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), koalisi inilah yang kemudian mengorganisir aksi demonstrasi dengan nama aksi bela Islam. Aksi tersebut dimulai pada Oktober 2016, 4 November 2016, dan yang terbesar adalah 2 Desember 2016.

Aksi demonstrasi dengan pengarahan massa yang sangat besar tersebut kemudian berkembang mengarah

kepada penjatuhan sosok Ahok sebagai calon gubernur. Penjatuhan tersebut bila dikaitkan secara historis maka berkaitan dengan politik agama dan etnis di Indonesia yang semenjak era kolonialisme terus dipelihara sebagai pertarungan yang tidak nampak dipermukaan. Dalam kasus ini dapat terlihat dari sosok Ahok yang merupakan keturunan Tionghoa dan beragama Kristiani.

Para kelompok ormas Islam yang menuntut hukuman tersebut merupakan bagian dari mayoritas agama yang ada di Indonesia, namun ada sebagian dari kelompok tersebut berasal dari kelompok intoleran seperti Front Pembela Islam (FPI) dan sebagainya. Logika ketakutan yang selama ini membekas pada kelompok minoritas bahwa massa intoleran dapat memanfaatkan berbagai isu untuk menekan mereka maju dalam politik Indonesia semakin terlihat pada aksi massa 2 Desember 2012.

Tayangan langsung televisi aksi bela Islam jilid III merupakan bagian dari memediatisasi politik ketakutan terhadap kelompok minoritas. Di luar skenario politik maupun kepentingan media, aksi massa dengan menggunakan isu agama dalam berpolitik merupakan hal yang mencederai demokrasi. Penggambaran jumlah massa yang besar dengan narasi dari reporter televisi di lapangan yang dramatis membuat pemaknaan ketakutan tersebut semakin nyata dan berpengaruh.

Pada akhirnya logika media tersebut dan logika tekanan massa di lapangan juga merambah kepada para politisi di Indonesia yang secara kolektif harus mengalah dengan besarnya jumlah massa tersebut.

Beberapa penggambaran itu dapat terlihat dari konten berikut ini :



Gambar1. Demo Massa

Dari gambar diatas terlihat bagaimana kata “Jutaan Massa berkumpul di Monas” menjadi tagline yang menegaskan bahwa massa sangat besar. Dengan angle kamera yang mengarah pada kepadatan massa berlatar belakang pembacaan ayat-ayat suci membawa suasana bagi penonton televisi kepada situasi mencuri perhatian. Massa merujuk pada gambaran diatas merupakan bagian dari kerumunan konvensional, di mana mereka bertemu dengan norma yang disatukan melalui agama. Selain pembacaan ayat suci dalam latar tersebut juga terdapat orasi-orasi dari tokoh-tokoh agama yang terus menyerukan agar penista agama di hokum dan penjarakan. Logika ketakutan disini mulai berperan dan mewarnai situasi tersebut, sehingga pidato di depan massa dan apa yang ditampilkan media tersebut membuat penonton yang melihat itu semakin mempertegas unjuk kekuatan mayoritas tersebut.

Logika mayoritas dan minoritas saling berdialektika dalam tayangan langsung tersebut serta secara tidak langsung media massa berperan kuat dalam memediatisasi massa yang bagi

kelompok sebagian minoritas ini mengkhawatirkan. Sementara bagi kelompok mayoritas gambaran itu seperti menimbulkan rasa percaya diri bahwa mereka disatukan oleh satu isu bersama yang dengan kata jutaan lebih mempertegas tekanan mereka terhadap pemerintah untuk melakukan langkah penghukuman bagi penghina ayat suci. Massa dalam hal ini dimainkan untuk ditampilkan dalam media sebagai bentuk tekanan dan unjuk kekuatan dari kelompok mayoritas yang sangat disayangkan kelompok tersebut sebagian pernah melakukan tindakan intoleran di Indonesia.



Gambar 2. Peserta Aksi 2 Desember 2016

Pada gambar 2 di narasikan bagaimana peserta aksi yang terdiri dari ribuan santri berjalan kaki menuju Jakarta untuk bergabung dalam aksi 2 Desember 2016. Kamera televisi lebih mengarahkan pada kerumunan massa yang banyak sambil berjalan dengan membawa atribut-atribut serta slogan yang mereka teriakan sebagai bentuk semangat. Santri berkaitan dengan orang-orang yang belajar agama di pesantren dan biasanya mereka dianggap menguasai ilmu agama dengan turunnya mereka maka bisa dikatakan ini menjadi sebuah aksi yang begitu penting dan sangat mempengaruhi agama. Gambar

tersebut memberitakan bagaimana para santri dari Ciamis, Jawa Barat berjalan kaki menuju Jakarta karena banyaknya pengelola bis menolak membawa para santri. Bentuk jalan kaki sebagai militansi mereka terhadap perjuangan agama serta ingin turut serta dalam aksi besar yang menyatukan umat Islam Indonesia. Gambaran heroik terlihat ketika media menampilkan bagaimana mereka di sambut oleh masyarakat di pinggir jalan yang mereka lalui, ini menambah kesan bahwa apa yang terjadi dalam persoalan penistaan agama ini sudah masuk dalam ranah yang sangat mengganggu masyarakat khususnya kelompok mayoritas. Hal ini seperti menampilkan kembali bagaimana politik para santri yang selama Orde Baru dibelenggu hanya oleh kekuasaan dan tidak memiliki hak bebas berpendapat, namun kini seperti mendapat ruang mereka menyuarakan ekspresi pendapatnya. Tayangan ini membawa para penonton televisi kepada gambaran bagaimana para santri yang mewakili agama mayoritas dengan militansinya mempertotokan sebuah pesan bahwa Islam sebagai agama yang besar di Indonesia memiliki pengikut yang begitu kuat dan memiliki nilai perjuangan pada agama yang tinggi.



Gambar 3. Perjalanan Aksi 2 Desember

Gambar 3 memperlihatkan para peserta aksi bela Islam sedang melakukan perjalanan menuju silang monas pusat dari kegiatan aksi 2 Desember. Pada tayangan langsung tersebut terlihat massa terdiri dari berbagai usia, jenis kelamin, dan organisasi berjalan dengan membawa poster-poster, atribut organisasi dan berbusana muslim meneriakkan tuntutan kepada Ahok dengan berbagai ungkapan kekesalan.

Poster dengan nada kecaman tersebut berkaitan dengan tuntutan sehingga pada angle ini terlihat seperti long march demonstrasi yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat. Disini terlihat bagaimana massa kembali di tampilkan sebagai fokus utama sehingga kuantitas dari aksi ini lebih terlihat besar dan massif dibandingkan apa saja pesan-pesan yang dapat berdampak pada keberagaman. Dalam situasi demikian para pelaku intoleransi dapat berada ditengah-tengah massa sehingga pesan yang mereka bawa melalui poster dan atribut secara tidak langsung dapat mempengaruhi para peserta aksi. Karena dalam kerumunan tersebut massa dapat terkontrol dengan mudah melalui sebuah arahan yang bisa hadir melalui suara para orator, atribut yang bernada provokatif, atau terjadi sesuatu yang bersifat mob (kerumunan massa yang besar dan tak terkontrol).

Dari beberapa gambar diatas tersebut politik massa masih begitu kuat menjadi ikon bagi pemberitaan media, sehingga logika massa yang besar mewakili suara yang paling besar semakin nyata ditampilkan. Dengan demikian ketakutan akan politik massa bagi kelompok minoritas semakin termediatisasi yang sebelumnya rasa takut

tersebut hanya menjadi pengalaman pribadi.



Gambar 4. Kapolri dalam aksi 2 Desember 2016

Tekanan massa yang besar dengan atribut keagamaan tersebut berdampak kepada pernyataan pemerintah dalam mengeluarkan pendapatnya mengenai tuntutan tersebut. Pada gambar 4 terlihat Kapolri memberikan pesan kepada para peserta aksi sekaligus menjawab tuntutan massa tentang status Ahok. Kapolri tidak serta merta mewakili elit politik namun posisinya membuat berada dalam barisan aparat negara yang memiliki kuasa untuk mengeluarkan kebijakan.

Dalam pernyataannya agar massa tenang dan tidak mengarah yang destruktif, Kapolri menyatakan bahwa kasus Ahok akan terus dikawal secara terbuka sampai tuntutan tersebut terpenuhi. Selain itu ada pernyataan juga dari Kapolri bahwa Ahok ketika berhadapan dengan KPK tidak jadi tersangka namun ketika berada di kepolisian statusnya dapat menjadi tersangka. Massa dalam tayangan itu terlihat sambil meneriakkan takbir serta meneriakkan tuntutan agar Ahok dipenjara dan nampak Kapolri seperti berusaha tenangkan situasi dengan pernyataan tersebut. Kapolri dalam hal ini mewakili pemangku kebijakan nampak tunduk

dengan tekanan massa tersebut dari pernyataannya, meski demikian hal ini bisa disebut sebagai bentuk negosiasi kepada massa. Pasca Orde Baru massa sering dimanfaatkan untuk melakukan tekanan ataupun ancaman kepada minoritas baik dalam bentuk kepercayaan, ideologi, ataupun hal yang berkaitan moralitas. Berdasarkan fatwa dari MUI biasanya kelompok massa yang intoleran ini melakukan tindakan tekanan tersebut sehingga ada legitimasi untuk melakukan kekerasan kepada minoritas tersebut. Logika tekanan massa ini sudah menjadi logika umum sehingga ketakutan dan kemarahan kepada kelompok intoleran ini tertuang dalam berbagai bentuk ruang media khusus dunia digital.



Gambar 5. Sholat Jumat peserta aksi

Aksi massa yang menamakan diri Bela Islam jilid III ini diakhiri dengan melakukan ibadah salat Jumat bersama di jalan utama kota Jakarta. Massa yang berdatangan dari berbagai wilayah ini kemudian memenuhi jalan raya karena area monumen nasional sebagai pusat dari salat Jumat tersebut tidak mampu menampung jamaah. Ibadah Jumat ini seperti klimaks dari aksi massa tersebut dan merupakan bentuk lain dari aksi yang

tuntutan utamanya adalah hukuman bagi Ahok karena dianggap telah menistakan agama. Televisi menayangkan langsung salat Jumat ini dengan angle yang sangat dramatis dan mengesankan bahwa ibadah ini sebagai momentum terbesar umat Islam di Indonesia pasca Orde Baru. Ibadah salat Jumat dengan memakai tempat jalan umum tersebut bukanlah menjadi persoalan utama, namun pesan yang tersampaikan kepada publik bahwa terlihat kelompok yang mayoritas dapat melakukan hal itu sedangkan minoritas tidak. Fakta ini bisa terlihat pada beberapa kejadian selama beberapa dekade belakangan ini dimana ibadah agama minoritas selalu mendapat tetantangan ketika ingin menjalankan ritualnya terutama dari kelompok intoleran tersebut. Gambaran diatas seperti menegaskan bahwa umat muslim sebagai kelompok mayoritas memiliki kuasa terhadap ruang publik dalam menjalankan ibadah.

KESIMPULAN

Permasalahan mayoritas dan minoritas dalam kehidupan sosial di Indonesia selalu berujung kepada politisasi massa. Massa menjadi alat paling utama dalam melakukan tekanan dan kemudian menyebarkan rasa takut kepada kelompok yang ditekan. Aksi bela Islam jilid III dijadikan momentum oleh kelompok intoleran untuk menyebarkan rasa takut tersebut agar tujuan utama yang ingin dicapai yakni menekan dan memberikan peringatan kepada kelompok minoritas agar tidak terlalu berkuasa dapat terwujud. Tulisan ini membahas bagaimana bentuk politik ketakutan berupa tekanan massa

tersebut di mediatitasi oleh media dalam liputan langsung aksi massa 2 Desember 2016.

Logika politik ketakutan dan massa yang ada selama ini dalam pandangan kelompok minoritas hanya berada dalam pikiran berdasarkan pengalaman masa lalu yang penuh dengan kekerasan serta ancaman. Ketakutan dan massa menjadi sebuah dua kutub yang selama ini saling bertegangan dengan wujud berupa tekanan secara psikologi khususnya dirasakan kepada minoritas. Massa intoleran kemudian memanfaatkan media massa untuk menampilkan kekuatannya sehingga dalam bingkai pemberitaan mereka terlihat kuat dan mendominasi. Media massa dengan berbagai kepentingannya memiliki peran yang cukup signifikan dalam menciptakan rasa takut terhadap minoritas tersebut. Sehingga logika dari para pekerja media beserta kepemilikannya secara tidak sengaja terkadang terbawa oleh arus logika massa dengan jumlah yang besar. Aksi bela Islam jilid III yang disiarkan langsung oleh televisi di Indonesia merupakan bagian dari mediatiasi politik ketakutan dan massa tersebut. Sehingga gambaran bahwa minoritas tidak bisa berkuasa dan apabila ingin melakukan hal itu maka mereka harus tunduk kepada logika mayoritas tergambar dalam aksi ini. Penelitian itu perlu dikembangkan pada ranah disiplin ilmu lain seperti studi agama, budaya, sosiologi, dan politik agar lebih memperkaya ruang dialog antar berbagai disiplin ilmu dalam mengkaji politik ketakutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Altheide, L, David. 2006. *Terrorism and the Politics of Fear*. London, Altamira Press
- Dawis, Aimee. 2010. *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, Jakarta, Gramedia.
- Couldry, Nick/Hepp, Andreas. 2013. *Conceptualising mediatization: Contexts, traditions, argument*. dalam *Communication Theory*, 23 (3), pp 191-202
- Hepp, A. 2009. *Differentiation: Mediatization and Cultural Change*. In K. Lundby (Ed.), *Mediatization: Concept, Changes, Consequences* (pp. 135-154). New York: Peter Lang.
- Hepp, A.(2013). *Cultures of mediatization*. Cambridge: Polity Press
- Hjarvard, S. 2008. *The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change*. Nordicom Review
- Hjarvard, Stig. 2013. "From Mediation to Mediatization: The Institutionalization of New Media." Paper presented at the Annual Conference of the International Communication Association (ICA), London, June 17–21
- Heryanto, Ariel. 2012, *Budaya Populer di Indonesia*, Yogyakarta, Jalasutra
- Heryanto, Ariel. 2015. *Identitas dan Kenikmatan*, Jakarta, Kompas Gramedia
- Human Rights Report. 2013. *Atas Nama Agama Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, Washington DC, Amerika Serikat

- Michael Meyen, Markus Thieroff & Steffi Strenger. 2014. *Mass Media Logic and The Mediatization of Politics*, *Journalism Studies*, 15:3, 271-288,
- Suryadinata, Leo. 2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Stolley, Kathy S. 2005. *The Basics of Sociology*, Greenwood Press, London